

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alan J. Boulton. *Struktur Hubungan Industrial di Indonesia Masa Mendatang*. Kantor Perburuhan Internasional: Jakarta, 2002.
- Ediwarman. 2011. *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan : Monograf.
- Fadhallah. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press, 2020.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan: Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Juliani, Henny. *Buku Ajar Hukum Keuangan Negara*. Semarang: Penerbit Yoga Pratama, 2020.
- KBBI. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
- Mahfud MD, Moh. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (edisi revisi)*. Jakarta: Renaka Cipta, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- M. Hadjon, Philipus dkk. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Purnamawati, I Gusti Ayu, dan Gede Adi Yuniarta. *Ekonomi Makro Teori dan Kebijakan*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Rawls, John. Penerjemah Uzair dan Heru Prasetyo. *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan*

- Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Simamora, H. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : STIE YKPN
- Soeroso R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Sofiana, Triana. *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*. Yogyakarta: Penerbit DeePublish, 2020.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metedologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Telaumbanua, Dalinama. *Hukum Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Penerbit DeePublish, 2019.
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Peraturan Perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
- e. PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 36 Tahaun 2021 tentang Pengupahan.

- f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2022;
- g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.
- h. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Cara Kerja Dewan Pengupahan.
- i. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025;
- j. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Pengupahan;
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah;
- l. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/35 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Dan Sekertariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2022-2025;
- m. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/38 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Jurnal dan Bahan Ajar:

Andi Heny Mulawati, (2023) “Integrasi Sistem Perencanaan Partisipatif, Teknokratif, dan Politis dalam Perencanaan dan Penganggaran Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota,” *Jurnal Institut Pemerintahan dalam Negeri*.

Fachul Nur Rohmah, Sonhaji, dan Suhartoyo, (2017) “Analisa Yuridis terhadap Fungsi dan Peran Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Semarang dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja di Kota Semarang,” *Diponegoro Law Journal* Volume 6 Nomor 2.

Hasyim Hasanah, (2016) “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial),” *Jurnal at-Taqaddum* 8.1.

I Wayan Gede Wiryawan, “Dilematika Kebijakan Upah Minimum dalam Pengupahan di Indonesia,” *Jurnal Advokasi*, vol. 6, no. 1, 2016.

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, (2020) “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* vol. 7 edisi I, (ISSN: 0852-011).

Lubis, A, (2009) “Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan,” *Jurnal Tabularasa PPS UNIMED*, 6(2), pp, (ISSN: 1693-7732)

Sonhaji, (2018) “The Position of The Workers’ or Laborers’ Severance Pay and Other Rights in The Bankruptcy of a Company,” *Diponegoro Law Review* Volume 03, Number 02.

Suhartoyo, (2019) “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional,” *Administrative Law & Governance* Volume 2 Issue 2.

Suhartoyo, (2020) “Perlindungan Hukum Mengenai Pengupahan Terhadap Pekerja/Buruh Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,” *Administrative Law & Governance Journal* 3.3.

Suhita Laxmi Dewi, Sonhaji, dan Budi Ispriyarso, (2017) “Penerapan Prinsip Non Diskriminasi dan Kesetaraan dalam Pengupahan Bagi Pekerja/Buruh di Kabupaten Kendal,” *Diponegoro Law Journal* Volume 6 Nomor 1.

Sulistiyawan, Aditya Yuli. 2023. Bahan Ajar pada Mata Kuliah Metodologi dan Penulisan Hukum Kelas M.

Triani Fatika Hasri, Sonhaji, dan Suhartoyo, (2020) “Peran Dewan Pengupahan Kota Semarang dalam rangka Perlindungan (Upah) Pekerja/Buruh,” *Diponegoro Law Journal* Volume 9 Nomor 1.

Yetniwati, “Pengaturan Upah berdasarkan atas Prinsip Keadilan,” *Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 1, 2017,

Internet:

https://setneg.go.id/view/index/dewan_pengupahan_nasional_1

<https://berandahukum.com/a/Dewan-Pengupahan>

LAMPIRAN

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS HUKUM	Jalan dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275 Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918206 Laman: www.fm.undip.ac.id Pos-el: fm@live.undip.ac.id
Nomor	: 999 /UN7.F1/AK/XI/2024	25 NOV 2024
Lamp.	:	
Hal	: Permohonan Riset/Penelitian	
 Yth. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Jl. Pahlawan No.16 Semarang		
 Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan penulisan hukum (skripsi) sesuai dengan kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.		
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:		
nama	: Bagas Priyo Utomo	
NIM	: 11000121140186	
alamat	: Jl. Timoho Timur Raya, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang	
nomor HP	: 082137102047	
bidang minat	: Hukum Administrasi Negara	
judul skripsi	: Pelaksanaan Peran Dan Wewenang Dewan Pengupahan Provinsi Terhadap Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah	
Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.		
 Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. NIP. 196711191993032002		



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pahlawan No.16 Kode Pos 50241

Telp. 024-8311713 Faks. 024-8311711

Website : disnakertrans.jatengprov.go.id Email : disnakertrans@jatengprov.go.id

SURAT – KETERANGAN

Nomor : 800 / 7804

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD AZIZ, SE, M.Si
NIP : 19680617 199803 1 007
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah
Unit Organisasi : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bagas Priyo Utomo
NIM : 11000121140186
Program Studi : Hukum

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian di Dinas Tenaga kerja Dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Semarang, 16 Desember 2024

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH

